

STRATEGI *HEDGING* TURKI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RESPONS NATO ATAS PERANG RUSIA-UKRAINA (2022-2025)

Rachel Kumendong

Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Pelita Harapan, Indonesia
rachel.kumendong@uph.edu

Beatrice Sungkono

Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Pelita Harapan, Indonesia
01043240063@student.uph.edu

Bias Permata

Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Pelita Harapan, Indonesia
01043240054@student.uph.edu

Kayla Yosin

Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas
Pelita Harapan, Indonesia
01043240076@student.uph.edu

Abstract

This article aims to analyze Turkey's hedging strategy in the context of the Russia–Ukraine war (2022–2025) and its implications for NATO's response. Since Russia's invasion of Ukraine on February 24, 2022, Turkey—as a NATO member—has demonstrated a distinct response compared to other alliance countries. Instead of imposing economic sanctions on Russia, Turkey chose to maintain relations in various sectors, raising doubts about the consistency of its commitment to preserving alliance commitment. This study employs a qualitative method with a focus on literature review to explore the dynamics of Turkey's foreign policy. The main research question posed is: to what extent has Turkey's hedging strategy in the Russia–Ukraine war affected NATO's commitment and response toward Russia? The findings suggest that Turkey's hedging strategy does not merely weaken the alliance's commitment but also opens opportunities for NATO to enhance its deterrence capability against Russia while supporting Ukraine's struggle.

Keywords: *hedging strategy, turkey's foreign policy, russia-ukraine war, security alliance, NATO*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi hedging Turki dalam konteks perang Rusia–Ukraina (2022–2025) serta implikasinya terhadap respons NATO. Sejak invasi Rusia ke

Ukraina pada 24 Februari 2022, Turki—sebagai anggota NATO—menunjukkan respons yang berbeda dibandingkan negara-negara aliansi lainnya. Alih-alih memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, Turki memilih untuk mempertahankan hubungan di berbagai sektor, sehingga menimbulkan keraguan mengenai konsistensi komitmennya dalam menjaga solidaritas aliansi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi literatur untuk mengeksplorasi dinamika kebijakan luar negeri Turki. Pertanyaan penelitian utama yang diajukan adalah: sejauh mana strategi hedging Turki dalam perang Rusia–Ukraina memengaruhi komitmen dan respons NATO terhadap Rusia? Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi hedging Turki tidak semata-mata melemahkan komitmen aliansi, tetapi juga membuka peluang bagi NATO untuk meningkatkan kemampuan daya tangkalnya terhadap Rusia sekaligus mendukung perjuangan Ukraina.

Kata kunci: *strategi hedging, kebijakan luar negeri Turki, perang Rusia-Ukraina, aliansi keamanan, NATO*

Pendahuluan

Aliansi keamanan adalah bentuk kerja sama antarnegara yang bertujuan untuk menciptakan jaminan keamanan kolektif (*collective security*) di tengah ancaman bersama, atau dalam upaya mempertahankan stabilitas kawasan (Bailes & Cottey, 2006). Aliansi ini dapat melibatkan pertukaran informasi, kerja sama militer, dan dukungan satu sama lain dalam menghadapi tantangan keamanan. Dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, yakni ketiadaan otoritas supranasional yang dapat menjamin keamanan suatu negara secara absolut, aliansi keamanan dipandang sebagai bagian integral dari kepentingan bangsa.

Ketidakpastian global mendorong negara-negara untuk membentuk aliansi guna mengurangi kerentanannya terhadap ancaman eksternal, sekaligus memastikan keseimbangan kekuatan. Dalam hal ini, aliansi keamanan menyediakan struktur dan kerangka yang diperlukan bagi negara-negara untuk merespons tantangan bersama, sekaligus memastikan kestabilan politik dan militer dalam lingkungan internasional yang sering kali penuh ketegangan (Walt, 1990).

Salah satu contoh aliansi keamanan yang paling kuat dan berpengaruh di kancah global adalah *North Atlantic Treaty Organization* atau Organisasi Pakta

Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Dibentuk pada tahun 1949, NATO lahir dari kebutuhan negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk membentuk sebuah barikade kolektif antara dunia barat dan USSR karena ancaman ekspansi Soviet pasca-Perang Dunia II mencapai perbatasan Jerman (Armutlu, 2023).

NATO beranggotakan 32 negara, meliputi kawasan Amerika Utara dan Eropa. Umumnya dikenal sebagai aliansi keamanan, NATO merupakan aliansi politik pula melalui perannya sebagai wadah kerja sama politik dan strategis antar anggota guna mempertahankan nilai-nilai demokrasi, kebebasan individu, dan supremasi hukum (Kaplan, 2004). Prinsip utamanya terletak pada '*Collective Defense Clause*' yakni Pasal 5 dalam Piagam NATO yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (Armutlu, 2023). Hal ini menjadikan NATO simbol solidaritas keamanan kolektif internasional.

Turki resmi bergabung dengan NATO pada tahun 1952 bersama Yunani, sebagai bagian dari gelombang ekspansi awal aliansi tersebut. Keputusan ini terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal pada masa itu, yakni perubahan keseimbangan kekuatan pasca-Perang Dunia II dan ancaman ekspansi Uni Soviet yang berbatasan langsung dengan wilayah

Turki (Armutlu, 2023). Namun demikian, dinamika internal juga memainkan peran penting dalam mendorong keanggotaan Turki di NATO, antara lain kebutuhan akan bantuan militer dan ekonomi, upaya mempertahankan sistem demokrasi yang masih relatif muda, serta aspirasi untuk memperoleh identitas sebagai “Negara Barat.” Dari perspektif NATO, kehadiran Turki memperkuat pertahanan di sisi selatan aliansi sekaligus menegaskan orientasi politik luar negeri Turki yang pro-Barat selama Perang Dingin.

Seiring berjalannya waktu, hubungan Turki dengan NATO menghadapi berbagai tantangan akibat perbedaan kepentingan nasional. Perubahan politik domestik di bawah dominasi Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi*, AKP) serta kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan memengaruhi arah kebijakan luar negeri Turki terhadap aliansi (Parmeter, 2023). Ambisi untuk menegaskan posisi sebagai *emerging middle power* (Dal & Dal, 2015) semakin mendorong Turki mengambil langkah-langkah independen dalam politik internasional. Selain itu, transformasi ancaman global telah melahirkan dinamika baru dalam hubungan internasional yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan NATO, sehingga menciptakan ketegangan antara

kepentingan domestik Turki dan komitmen aliansi (Balta & Bal, 2025).

Ketegangan ini semakin meningkat dengan respon NATO terhadap konflik Rusia-Ukraina. Isu tersebut memperdalam ketidakselarasan kebijakan antara Turki dan negara-negara NATO lainnya yang tergabung dalam aliansi. Ketidakselarasan pandangan dalam menghadapi krisis ini menunjukkan adanya perbedaan persepsi yang semakin mencolok, mengancam kestabilan hubungan antara Turki dan NATO di masa depan.

Invasi Rusia ke Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 menjadi momen penting dalam geopolitik global (BBC, 2025). Perang ini dipicu oleh kekhawatiran Rusia terhadap perluasan NATO ke wilayah timur serta upaya Ukraina untuk mempererat hubungan dengan Barat. Rusia mengklaim bahwa intervensinya bertujuan untuk melindungi komunitas berbahasa Rusia di Ukraina Timur dan menolak apa yang mereka sebut sebagai “ancaman eksistensial” dari NATO (Mearsheimer, 2022). Di sisi lain, komunitas internasional secara luas mengecam invasi tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hukum internasional.

Turki menunjukkan sikap yang berbeda dibandingkan mayoritas anggota NATO terkait dengan invasi Rusia ke

Ukraina. Meskipun Turki mengecam tindakan Rusia sebagai “pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku” dan mendukung kedaulatan Ukraina, negara ini tetap menjaga hubungan pragmatis dengan Rusia di bidang energi, perdagangan, dan keamanan regional (Parmeter, 2023). Pendekatan ini dinilai selaras dengan strategi *hedging* yang umumnya menjadi karakteristik dari *Emerging Middle Power* (Shlykov, 2023), yakni sebuah strategi penyeimbangan Turki untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan menaati komitmen aliansi dengan NATO.

Sebagai bagian dari upaya diplomasi aktif, Turki turut berperan sebagai penengah dalam perjanjian ekspor gandum antara Rusia dan Ukraina. Langkah ini menunjukkan bagaimana langkah Turki yang sering kali dikritik sebagai tidak setia, ternyata berseberangan dengan strategi *deterrence* dan dialog yang diutamakan oleh NATO (Dalay & Isachenko, 2022). Kebijakan Ini menggarisbawahi keinginan Turki untuk memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas regional, meskipun menghadapi tekanan dari sekutu-sekutu Barat.

Perbedaan pendekatan antara Turki dan mayoritas anggota NATO menimbulkan pertanyaan tentang masa depan hubungan Turki dengan aliansi

tersebut, terutama mengenai dampak ketidaksepahaman ini terhadap kohesi internal NATO. Artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan “Sejauh mana strategi hedging Turki dalam Perang Rusia–Ukraina memengaruhi komitmen dan respons NATO terhadap Rusia?”. Pada artikel ini, penulis turut membahas bagaimana perbedaan strategi antara Turki dan NATO dalam perang tersebut mempengaruhi stabilitas dan integritas internal aliansi dalam menghadapi tantangan ancaman Rusia.

Keberadaan NATO memiliki dampak strategis yang luas, tidak hanya untuk keamanan kawasan Eropa dan Timur Tengah, tetapi juga untuk tatanan keamanan global yang berbasis aturan. Maka dari itu, dengan menyadari pentingnya NATO dan kekuatan yang dimilikinya dalam menjaga stabilitas dan keamanan global, menganalisis perbedaan pendekatan Turki sebagai bagian dari NATO merupakan hal yang penting. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam literatur studi keamanan internasional dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana aktor-aktor dalam aliansi dapat beradaptasi atau bahkan berkonflik dalam menyeimbangi kepentingan domestik dengan kepentingan aliansi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Menurut Lamont (2015), penelitian dalam ilmu sosial tidak hanya berfokus pada pengukuran kuantitatif, tetapi juga memerlukan pendekatan kualitatif untuk menafsirkan makna, memahami konteks, serta mengungkap kompleksitas hubungan sosial dan politik. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dinamika strategi hedging Turki dan implikasinya terhadap respons NATO.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh melalui dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Turki dan NATO, seperti pernyataan kebijakan, laporan resmi, serta publikasi dari situs web institusi terkait. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari karya ilmiah yang kredibel, khususnya artikel jurnal akademik, buku akademik, dan laporan analisis lembaga riset internasional.

Tahapan penelitian dilakukan dalam tiga langkah utama. Pertama, **pengumpulan data**, yakni identifikasi dan penghimpunan literatur primer maupun sekunder yang relevan. Kedua, **pengolahan data**, yaitu seleksi, klasifikasi, dan analisis

isi guna menafsirkan argumen serta temuan yang berkembang dalam literatur. Ketiga, **penarikan kesimpulan**, yaitu merumuskan temuan konseptual mengenai strategi hedging Turki dan dampaknya terhadap respons NATO dalam konteks Perang Rusia–Ukraina.

Kerangka Teori

***Hedging* dalam Perspektif Struktural Realisme**

Realisme lahir dari asumsi bahwa sistem internasional hidup dalam sebuah dunia yang anarkis atau dunia yang tidak memiliki pengatur tunggal. Realisme berfokuskan kepada negara sebagai aktor utama yang bergerak dalam sistem global anarkis ini. Dalam dunia seperti ini, negara dipaksa harus mengandalkan kekuatan sendiri (*self-help*) untuk bertahan. Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics* (2010) menyebutkan bahwa struktur sistem global mendorong negara untuk bertindak rasional dengan menjauh dari ketergantungan dan terus memperkuat diri melalui kemampuan militer.

Berbeda dengan gagasan Hans Morgenthau yang menyatakan bahwa perebutan kekuasaan antar negara tiada hentinya akibat *animus dominandi* (natur manusia untuk mendominasi atas orang lain), John Mearsheimer menyatakan bahwa perebutan kekuasaan ini memiliki

batas (Snyder, 2002). Batas yang ditentukan bukan dari natur manusia, melainkan pencarian keamanan yang dipaksakan oleh struktur anarkis sistem internasional.

Dalam gagasan Mearsheimer (2001), *offensive realism* menegaskan bahwa negara tidak hanya ingin mempertahankan posisi, tetapi juga mencari cara untuk memperbesar kekuasaan agar bisa memperoleh keamanan yang lebih besar. *Status quo* dalam dunia politik jarang ditemukan, karena sistem anarkis internasional melahirkan sebuah insentif bagi negara-negara untuk memperoleh kekuatan lebih, walau dengan mengorbankan negara-negara lain (Snyder 2002). Salah satu pendekatan yang berakar pada logika realisme ini adalah *hedging* (Kawasaki, 2021), yaitu strategi yang digunakan untuk menyeimbangkan antara risiko dan peluang, terutama saat berhadapan dengan ketegangan antara kekuatan besar. *Hedging* didefinisikan sebagai serangkaian inisiatif kebijakan yang saling bertentangan dan memberikan sinyal ambigu kepada kekuatan atau blok kekuatan yang bersaing, dengan maksud untuk mempertahankan otonomi strategis maksimum dalam hubungan internasional suatu negara (Marston, 2023).

Dalam realisme, terdapat konsep praktik kenegaraan (*statecraft*) yang

merupakan seni menjalankan kekuasaan untuk mencapai kepentingan nasional. Pendekatan realis menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri harus didasarkan pada kalkulasi yang matang, bukan idealisme.

Pada umumnya, strategi *statecraft* meliputi strategi *balancing* dan *bandwagoning* (Shlykov, 2023). *Balancing* berkaitan dengan tindakan sebuah negara meningkatkan pertahanan dan kekuatan dirinya di hadapan ancaman keamanan. Komponen internal *balancing* berkaitan dengan kebijakan suatu negara memperkuat kapabilitas dan sumber daya pertahanannya, melainkan komponen eksternal berkaitan dengan memperkuat hubungan keamanan dengan kekuatan luar (dapat berupa koalisi) dalam menanggapi sumber ancaman.

Di lain sisi, *bandwagoning* merupakan strategi sebuah negara mengikatkan diri dengan sumber ancaman (*threatening power*) karena tidak terlihat alternatif lain. Dibandingkan menyeimbangkan (*balancing*) atau melawan sumber ancaman, negara *bandwagoning* berusaha untuk memanfaatkan kekuatan perlindungan dari sumber ancaman tersebut.

Strategi *hedging* umum dipandang sebagai sebuah strategi yang terletak di antara *balancing* dan *bandwagoning*, dengan karakteristik yang berasal dari

keduanya (Shlykov, 2023). Strategi *hedging* mendeskripsikan banyak fitur dari kebijakan kekuatan menengah dan negara kecil, dimana negara-negara ini memiliki ruang manuver yang lebih luas terhadap negara adikuasa dan condong melakukan diversifikasi kebijakan luar negeri mereka (Cheng-Chwee, 2016).

Menurut Cheng-Chwee (2016), *hedging* adalah usaha menghindari keterikatan total pada satu kutub kekuatan, sembari tetap menjalin kerja sama dengan berbagai pihak secara selektif. Kesuksesan implementasi dari strategi *hedging* ditunjukkan dari kemampuan sebuah negara untuk menggabungkan elemen penerimaan dan penolakan terhadap kekuatan global di daerah regionalnya. Hal ini dilakukan melalui pengimbangan relasi yang tidak secara total mengantagoniskan maupun mensubordinasikan diri terhadap kekuatan-kekuatan dominan (Shlykov, 2023).

Selain itu, Lim dan Cooper (2015) menunjukkan bahwa dalam dunia multipolar saat ini, strategi *hedging* justru semakin penting. Bagi mereka, *hedging* tidak hanya soal menjaga keseimbangan kekuatan, tetapi juga tentang menakar risiko dan peluang secara proporsional. Evelyn Goh (2022) pula menjelaskan bahwa *hedging* merupakan cara untuk beradaptasi dengan ketidakpastian jangka

panjang. Strategi ini terdiri dari tiga pilar utama: (1) memperkuat kerja sama ekonomi; (2) menjaga komunikasi strategis, dan; (3) membangun pertahanan nasional.

Pembahasan

Posisi NATO dalam Perang Rusia-Ukraina

Invasi yang dilakukan Rusia terhadap Ukraina pada Februari 2022 menjadi titik balik penting dalam dinamika keamanan internasional pasca perang dingin (BBC, 2025). Sebagai aliansi pertahanan utama di dunia Barat, NATO memandang agresi ini sebagai pelanggaran yang serius terhadap hukum dan prinsip dasar sistem internasional yang berdiri atas fondasi saling menghormati kedaulatan suatu negara. NATO merespons dengan menunjukkan penegasan kembali terhadap komitmen mereka dalam menjaga stabilitas di Kawasan Euro-Atlantik dan juga mendukung kedaulatan serta integritas wilayah Ukraina. Respons ini dilakukan melalui kebijakannya yang bertujuan untuk menghalau (*deter*) Rusia dan memperkuat Ukraina.

Dalam perspektif NATO, tindakan Rusia dianggap sebagai serangan yang tidak beralasan terhadap negara berdaulat (*sovereign state*). NATO di dalam pernyataan resminya menyebut bahwa invasi tersebut sebagai “*a grave of*

violation of international law” dan “*a threat to Euro-Atlantic security*” (NATO, 2022). Serangan tersebut tidak hanya dipandang sebagai agresi militer, tetapi juga sebagai tantangan langsung terhadap prinsip kedaulatan, integritas wilayah, dan hak setiap negara untuk menentukan kebijakan luar negerinya tanpa ada intervensi dari pihak eksternal. Rusia dianggap sedang berusaha untuk mengubah *status quo* secara paksa dan menciptakan zona pengaruh dengan cara kekerasan. Tindakan invasi ini menimbulkan sebuah kondisi berbahaya yang mengguncang stabilitas kawasan dan menghidupkan kembali pola konfrontasi geopolitik seperti pada Perang Dingin (Kimmage, 2022).

Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini mendorong NATO untuk memperbarui konsep strategisnya pada KTT Madrid 2022. Di dalam dokumen tersebut, menyatakan bahwa Rusia secara eksplisit sebagai “*the most significant and direct threat to Allies’ security*” (NATO, 2022). Hal tersebut merupakan perubahan yang signifikan dari dokumen sebelumnya di tahun 2010 yang masih mencantumkan Rusia sebagai mitra strategis. Selanjutnya, NATO menegaskan bahwa kekuatan militer kolektif aliansi tidak hanya akan digunakan untuk pertahanan, akan tetapi untuk mendukung pula negara-negara mitra dalam menjaga stabilitas dan menjaga

destabilisasi kawasan. Ukraina, Georgia, dan Moldova termasuk di dalam daftar negara yang menjadi mitra yang mendapatkan prioritas kerja sama keamanan.

Meskipun Ukraina tidak termasuk dalam negara yang menjadi bagian dari NATO, relasi antara NATO dengan Ukraina telah berlangsung semenjak awal 1990-an dan berkembang menjadi salah satu partner NATO yang paling substansial (NATO, 2025). Ketika Rusia menginvasi Ukraina, organisasi ini merespons dengan memberikan dukungan yang kuat terhadap hak Ukraina untuk membela diri. Hal ini bukan hanya dilandaskan hubungan NATO-Ukraina, melainkan berlandaskan pula pada Pasal 51 Piagam PBB yang berisikan “hak yang melekat pada setiap individu atau kelompok untuk membela diri (*self-defence*) jika terjadi serangan bersenjata terhadap dirinya”.

NATO tidak secara langsung mengirim pasukan tempur ke Ukraina, tetapi negara-negara anggotanya secara bilateral – dengan koordinasi dalam kerangka NATO – menyediakan berbagai bentuk bantuan, termasuk pelatihan militer, senjata pertahanan, sistem rudal, kendaraan tempur, dan juga dukungan intelijen (Balta & Bal, 2025). Dukungan yang diberikan mencakup sistem pertahanan udara (seperti NASAMS dan IRIS-T) dari negara-negara

Barat, rudal anti-tank (Javelin dan NLAW), sistem roket HIMARS, drone pengintai, dan pelatihan intensif terhadap personel militer Ukraina di wilayah Eropa Barat.

NATO juga memperluas kehadiran militernya di wilayah Eropa Timur. Melalui penguatan *Enhanced Forward Presence* di Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia, serta pengerahan pasukan tambahan di Bulgaria, Hongaria, Rumania, dan Slovakia, NATO menunjukkan komitmen terhadap prinsip *deterrence and defense* terhadap Rusia (NATO, 2022). Langkah-langkah yang dilakukan memiliki sifat defensif dan ditujukan untuk mencegah perluasan konflik dan ancaman Rusia ke wilayah anggota NATO lainnya. Selain itu, NATO juga memperluas koordinasi dengan Uni Eropa dan negara mitra strategis di Asia-Pasifik, seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan tekanan terhadap Rusia.

Mayoritas negara anggota NATO, bersama dengan Uni Eropa dan G7, mempergunakan paket sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia. Meskipun secara institusional NATO tidak mengaplikasikan sanksi, aliansi mendukung penuh kebijakan negara-negara anggotanya untuk menekan (*suppress*) kemampuan militer dan ekonomi Rusia.

Jenis sanksi dan tindakan yang diterapkan mencakup pembekuan aset serta pembatasan perjalanan bagi sejumlah tokoh penting dalam pemerintahan Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov (European Council, 2022). Selain itu, diterapkan pula sanksi di sektor perbankan, seperti pengeluaran beberapa bank utama Rusia dari sistem transaksi internasional SWIFT. Di bidang energi, diberlakukan embargo secara bertahap terhadap minyak dan batu bara Rusia sebagai upaya mengurangi ketergantungan negara-negara anggota NATO terhadap pasokan energi Rusia (IEA, 2022). Langkah lainnya adalah pembatasan ekspor teknologi canggih, termasuk microchip dan berbagai komponen yang digunakan dalam industri militer.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk melemahkan kemampuan Rusia membiayai perangnya dan mengisolasi negara tersebut dari sistem finansial global (Aslund, 2023). Negara-negara NATO juga memperkuat ketahanan energi mereka melalui diversifikasi sumber impor dan percepatan transisi energi, seperti terlihat dari peningkatan kerja sama energi antara Uni Eropa dan Amerika Serikat.

NATO memberi respon terhadap perang yang terjadi antara Rusia dan

Ukraina menunjukkan solidaritas internal aliansi terhadap nilai-nilai dasar seperti kedaulatan dan integritas wilayah. Melalui kombinasi dukungan militer terhadap negara Ukraina, penguatan pertahanan kawasan Timur, serta koordinasi sanksi dan embargo, NATO memposisikan dirinya sebagai aktor utama dalam penanggulangan krisis ini. Akan tetapi, kesatuan strategi di antara NATO tetap diuji oleh berbagai kepentingan nasional, seperti yang tercermin dari pendekatan yang diambil oleh Turki – yang akan dibahas lebih lanjut pada analisis berikut ini.

Kebangkitan Turki sebagai *Emerging Middle Power*

Kekuatan menengah atau *Middle Power* adalah negara-negara yang secara kekuatan, kapasitas, dan pengaruh internasional tidak tergolong besar ataupun kecil. Negara-negara kekuatan menengah ini mengerahkan usaha dalam mempromosikan kesatuan dan stabilitas dari sistem internasional (Jordaan, 2003). Pembahasan terkait *Middle Power* atau kekuatan menengah telah mengalami banyak perubahan. Sebelumnya, kekuatan menengah umumnya dipandang sebagai negara-negara kaya, stabil, dan egalitarian yang mempromosikan demokrasi dan sistem internasional yang berbasis liberal. Negara-negara tersebut dipandang sebagai

mediator, menjunjung ‘kewarganegaraan internasional yang baik’ (*good international citizenship*) untuk memandu diplomasi (Süsler, 2019).

Sejak berakhirnya Perang Dingin, muncul negara-negara berambisi yang ingin terlibat lebih aktif dalam memimpin dan memengaruhi sistem internasional. Menariknya, berbeda dari gambaran kekuatan menengah tradisional, negara-negara yang sedang bangkit ini (*emerging*) masih menghadapi persoalan kemiskinan, instabilitas, dan bahkan kerap tidak tergolong demokratis (Jordaan, 2003). Berbanding terbalik dengan *Traditional Middle Powers* yang cenderung mempertahankan status quo, negara-negara *Emerging Middle Powers* justru menolak ketidakadilan yang mereka alami dalam sistem internasional dan mendorong terjadinya reformasi (Jordaan, 2003). Öniş dan Kutlay (2017) menggambarkan dilema *Emerging Middle Powers* sebagai berikut:

“Sebuah dilema bahwa *Emerging Middle Powers* kritis terhadap tatanan liberal saat ini yang didominasi oleh kekuatan-kekuatan Barat yang mapan dan, pada saat yang sama, memiliki insentif untuk menjadi bagian dari tatanan internasional yang berdasarkan norma-norma liberal.”

Dalam konteks tersebut, kebijakan luar negeri Turki pasca-Perang Dingin

menunjukkan ambisi yang semakin besar untuk memperluas pengaruh internasionalnya. Ambisi tersebut tercermin dalam upaya meningkatkan kemampuan memaksa negara lain melakukan tindakan yang sebelumnya tidak mereka lakukan, sekaligus menolak tekanan dari aktor lain yang mencoba melakukan hal serupa (Süsler, 2019).

Kebangkitan Turki sebagai *Emerging Middle Power* semakin terlihat melalui kebijakan dan tindakan luar negeri selama masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan dan partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (*Adalet ve Kalkınma Partisi* atau AKP). Selama lebih dari dua dekade kekuasaan Erdoğan, kebijakan luar negeri Turki berfokus pada penegasan posisi sebagai kekuatan regional sekaligus peningkatan perannya dalam dinamika global. Turki memperkuat kedudukan internasionalnya melalui keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti NATO dan BRICS, serta melalui intervensi dalam sejumlah konflik internasional seperti Perang Saudara Suriah dan konflik Rusia–Ukraina (Nainggolan, 2020).

Sebagai *Emerging Middle Power*, Turki memainkan strategi yang kompleks yakni menyeimbangkan kepentingan nasional dengan komitmen terhadap aliansi yang diikutinya (Balta & Bal, 2025). Di

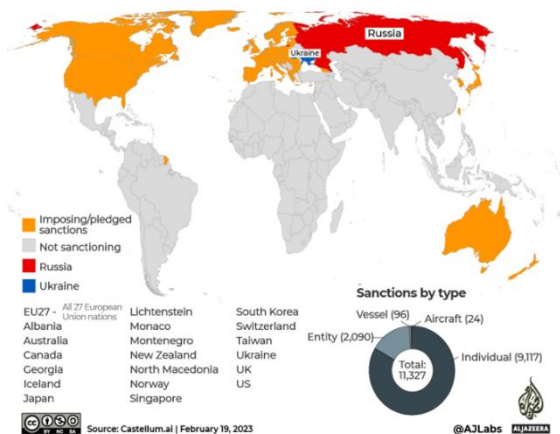
satu sisi, Turki mengkritik dominasi negara-negara kuat. Di sisi lain, Turki tetap memanfaatkan keuntungan yang muncul dari kerja sama dengan negara-negara tersebut.

Kebijakan Luar Negeri Turki: Hedging antara NATO-Ukraina dengan Rusia (2022-2025) sebagai Strategi Negara Kekuatan Menengah

Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melakukan invasi skala penuh ke Ukraina (BBC, 2025). Serangan ini dinilai lebih komprehensif dibandingkan invasi Rusia ke Krimea pada 2014. Invasi ini memicu respons yang lebih signifikan dari NATO dibandingkan respons sebelumnya di Krimea (2014). Sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, respons ini datang dalam dua bentuk utama: (1) memberikan bantuan militer untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan (2) memberlakukan sanksi untuk menghambat kemampuan agresi Rusia (Balta & Bal, 2025). Dalam usaha melawan invasi Rusia ini, seluruh anggota aliansi NATO memberlakukan sanksi, yakni embargo, terhadap industri-industri Rusia, seperti keuangan (bank), energi, pertahanan, dan teknologi. Namun, di antara komitmen aliansi NATO untuk menyerang kekuatan ekonomi Rusia, terdapat banyak inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Satu-

satunya negara anggota NATO yang tidak memberlakukan sanksi terhadap Rusia sampai dengan 2023 adalah Turki (Haddad, 2023).

Gambar 1. Negara yang Melakukan Sanksi Terhadap Rusia



Sumber: Haddad, 2023

Dalam responnya terhadap perang Rusia-Ukraina (2022-2025), Turki menunjukkan sebuah strategi kebijakan luar negeri yang menyeimbangkan komitmen aliansi NATO yang mendukung Ukraina dan kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas regional dengan menghindari memicu amarah Rusia (Dalay & Isachenko 2022). Strategi pendekatan Turki ini dinilai sesuai dengan posisi Turki sebagai *Middle Power* yang cenderung memberlakukan strategi *hedging* (Shlykov, 2023).

Konsep *hedging* sering kali menjadi sebuah fitur unik dari kebijakan-kebijakan negara kekuatan menengah, dimana negara-negara tersebut berinteraksi dengan

kekuatan global secara kompleks dan multidimensi. Di satu sisi, Turki secara vokal mendukung kedaulatan Ukraina dan mengkritik invasi Rusia – sebagaimana Turki mencap hubungannya dengan Ukraina sebagai “*truly friends in need*”.

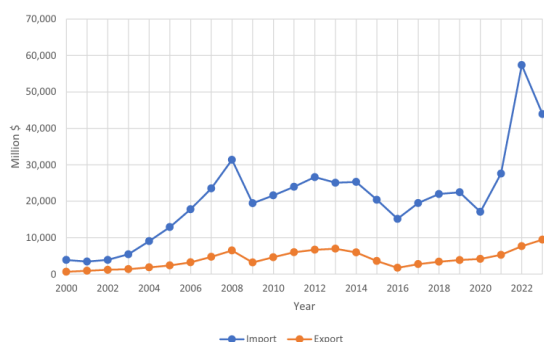
Dalam dukungannya terhadap Ukraina, Turki mengirimkan berbagai bantuan militer (Balta & Bal 2025). Semenjak invasi Rusia, pemerintah AKP mengirimkan tiga TB2 drone (sejenis *Unmanned aerial vehicles* (UAVs)) dan setuju untuk memproduksi lebih. Terlebih lagi, Turki secara aktif melakukan pembagian informasi dengan Ukraina semenjak invasi Rusia terjadi.

Di lain sisi, walaupun tidak dapat diperdebatkan bahwa Turki secara bulat mendukung kemerdekaan Ukraina dengan menetapkan invasi Rusia sebagai “*illegal military invasion*”, pemerintah AKP tetap melanjutkan hubungan dengan Rusia. Hubungan ini tergambarkan secara baik dari gagasan seorang duta besar yang sebelumnya melayani NATO:

“Langkah Turki merupakan keseimbangan yang rumit antara menunjukkan sikap menahan diri dan menghindari kesan berpihak pada sikap anti-Rusia. Kami mencoba menghindari eskalasi konflik lebih lanjut” (Balta & Bal, 2025).

Demi menjaga hubungan dan kepentingan Turki dengan NATO dan Rusia, Turki berat bermain sebagai mediator yang relatif netral dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak (Shlykov, 2023). Dari strategi ini, hubungan dagang dengan Rusia meningkat lebih dari dua kali lipat atau estimasi lebih dari \$70 miliar dari \$33 miliar sebelumnya. Hal ini membuat Turki partner dagang terbesar kedua dengan Rusia, setelah Cina, yang memainkan peran sebagai penyambung Rusia dengan Eropa.

Grafik 1. Nilai Ekspor-Impor Turki terhadap Rusia



Sumber: Balta & Bal, 2025

Sebagaimana digambarkan pada Grafik 1, impor Turki dari Rusia jatuh secara tajam setelah invasi Rusia ke Ukraina (Balta & Bal, 2025). Hal ini menggambarkan ketaatan parsial Turki dengan sanksi-sanksi NATO (misalnya, sanksi impor energi). Namun, ekspor Turki ke Rusia malah mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bagaimana sanksi-sanksi

NATO telah membuka jalan bagi Turki untuk semakin memasuki pasar Rusia.

Implikasi *Hedging* Turki bagi NATO: Kekuatan atau Ancaman?

Strategi *hedging* Turki telah membawa kekhawatiran besar di dalam aliansi NATO. Politisi Amerika Serikat mendeskripsikan kebijakan luar negeri Turki ini sebagai sekutu yang tidak setia (*"unfaithful ally"*) (Aydin & Aydıntaşbaş, 2025). Selama masa jabatan Erdogan dan dominansi AKP, keselarasan kebijakan luar negeri Turki secara perlahan semakin menjauh dari Uni Eropa. Sebelumnya, keselarasan ini berdiri di angka 88% pada 2008, 44% pada 2016, dan terakhir pada 2022 hanya 8% (Parmeter 2023). Sehingga, inkonsistensi Turki ini dianggap sebagai kekuatan yang mungkin memecah di dalam NATO. Namun, penulis berargumen bahwa peran unik Turki sebagai negara *Emerging Middle Power* tentu akan membuat kebijakan luar negerinya berbeda dari pendekatan umum anggota-anggota NATO, yang mayoritasnya *Traditional Middle Power*.

Turki yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi dengan Rusia harus menimbang secara baik kebijakan luar negerinya. Penulis berargumen bahwa strategi *hedging* Turki, secara khusus relasi mendalam Turki-Rusia, seharusnya tidak dipandang sebagai

hanya didorong secara mutlak oleh kepentingan domestik Turki. Melainkan, strategi *hedging* memberikan kekuatan bagi NATO untuk memperjuangkan kemerdekaan Ukraina dan membatasi ancaman Rusia.

Melalui strategi *hedging* Turki, Turki berhasil menjadi negara NATO pertama dan satu-satunya yang menginstitusionalisasikan relasi dengan Rusia (Shlykov, 2023). Terlebih lagi, Turki mendapatkan tawaran untuk menjadi negara partner BRICS, sebuah tawaran yang menunjukkan tingkat relasi dan kepercayaan negara seperti Rusia terhadap Turki. Dengan hubungan yang positif antara Turki dan Rusia, Turki dapat menjadi mediator aktif untuk diskusi perdamaian dalam perang Rusia-Ukraina (2022-2025). Sebuah usaha mediasi yang disambut oleh Rusia.

Pada 10 Maret 2022, tepat satu bulan setelah invasi Rusia ke Ukraina, Turki memfasilitasi pertemuan diplomatik antara Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmitry Kuleba, di Istanbul (Shlykov, 2023). Selain menyediakan ruang dialog bagi upaya de-eskalasi yang diharapkan NATO, Turki juga bekerja sama dengan PBB untuk mendorong tercapainya *Black Sea Grain Initiative* antara Ukraina dan Rusia. Melalui inisiatif ini, dibentuk sebuah

koridor laut yang aman untuk memungkinkan produk agrikultur Ukraina—termasuk gandum—dapat kembali diekspor, sehingga membantu meredakan krisis pangan global, terutama di kawasan Afrika (Shlykov, 2023). Selanjutnya, pada April 2024, Turki turut berperan dalam memfasilitasi pertukaran tahanan perang antara Rusia dan Ukraina (Aydin & Aydıntaşbaş, 2025).

Dibandingkan kritik umum yang menyatakan bahwa strategi *hedging* Turki mengancam usaha NATO untuk menghentikan agresi Rusia, penulis berargumen sebaliknya. Kebijakan luar negeri Turki ini seharusnya dinilai selaras dengan kebijakan umum NATO terhadap Rusia, yakni *deterrence* dan dialog, dibandingkan eskalasi konflik melalui kebijakan-kebijakan yang agresif (Dalay & Isachenko, 2022). Peran Turki sebagai mediator memberikan ruang bagi NATO mencapai kepentingan kolektifnya, yakni menjamin kedaulatan Ukraina yang merupakan sekutu NATO sejak lama dan menghalau ancaman Rusia di Eropa (Omiunu et al., 2024). Di saat yang bersamaan, kepentingan domestik Turki juga berbanding lurus dengan kepentingan NATO dalam perang Ukraina-Rusia ini. Sebagai sebuah negara yang terletak bertetangga dengan Rusia dan Ukraina, Turki memiliki kepentingan besar untuk

menjaga stabilitas daerah guna mengamankan sekuriti domestik (terutama di daerah Laut Hitam) (Armutlu, 2023).

Dalam komitmennya untuk mendukung Ukraina, Turki tidak segan menggunakan Artikel 19 dari Konvensi Montreux yang melanggar lalu lintas kapal militer pihak yang bertikai (Balta & Bal, 2025). Walaupun artikel ini membatasi minat Amerika Serikat, Britania Raya, dan anggota NATO lainnya dalam membantu Ukraina melalui jalur Laut Hitam, inisiatif ini membatasi kapal militer Rusia, yang dinilai lebih penting dibandingkan keuntungan yang dapat diperoleh melalui minat anggota-anggota NATO tersebut (Shlykov, 2023). Dengan kekuatan Turki sebagai pengatur akses Laut Hitam, Rusia memiliki kepentingan strategis untuk menjaga relasi dengan Turki (Parmeter, 2023). Kekuatan yang dimiliki Turki atas Laut Hitam dan lokasi strategisnya yang berbatasan langsung dengan Rusia dapat menjadi potensi bagi NATO untuk mengimbangi dan menghalau ancaman Rusia di Eropa dan Ukraina. Terlebih lagi, dengan jaminan keamanan yang ditawarkan Artikel 4 dan 5, NATO menjadikan keanggotaan Turki di NATO sebagai kepentingan besar bagi keamanan nasionalnya (Omiunu et al., 2024). Bersama dengan itu, komitmen aliansi yang cukup tinggi dalam NATO terhadap

perang Ukraina-Rusia membuat Turki memiliki ruang gerak cukup sedikit untuk bertindak terlalu menyimpang dari kebijakan NATO (Balta & Bal, 2025), kecuali jika Turki ingin memicu konflik aliansi.

Terdapat beberapa aspek penting yang menentukan implikasi Turki pada NATO: (1) Hubungan Turki-Rusia yang cukup positif membuat inisiatif mediasi Turki diterima; (2) Kekuatan Turki di Laut Hitam membuat Rusia harus bertindak hati-hati, dan; (3) Jaminan '*Collective Defense Clause*' yang ditawarkan NATO dipandang penting demi keamanan regional Turki. Atas dasar aspek-aspek tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Turki seharusnya dipandang sebagai sekutu yang berharga dan terpercaya, bukan hanya karena kekuatan dan pengaruhnya, namun karena kepentingan NATO dan Turki berjalan berdampingan.

Kesimpulan

Ketika Rusia menginvasi secara total Ukraina pada awal tahun 2022, NATO sigap merespons melalui pengiriman bantuan militer untuk memperkuat pertahanan Ukraina dan pemberlakuan sanksi ekonomi (misalnya embargo) untuk menghambat kemampuan agresi Rusia. Uniknya, Turki selaku sekutu NATO selama 73 tahun, memberlakukan kebijakan luar negeri yang berbeda terhadap Rusia

selama invasi berlangsung. Dalam menganalisis hubungan antara Turki dan NATO dalam konteks perang Rusia-Ukraina ini, terlihat bahwa kebijakan luar negeri Turki yang berdasar pada strategi *hedging* memainkan peran penting dalam interaksinya dengan aliansi tersebut. Sebagai negara *Emerging Middle Power* yang khas melakukan *hedging*, Turki berusaha menyeimbangkan kepentingan domestiknya dengan komitmennya terhadap aliansi. Di satu sisi, Turki mendukung kedaulatan Ukraina, mengirimkan bantuan persenjataan, dan mengkritik invasi Rusia, tetapi di sisi lainnya, Turki memilih untuk menjaga hubungan pragmatis dengan Rusia dalam berbagai bidang industri.

Kebijakan *hedging* Turki ini membawa implikasi penting bagi kohesi internal NATO. Perbedaan sikap dengan kebijakan sanksi NATO ini sering kali dinilai sebagai inkonsistensi dan ketidaktaatan Turki terhadap aliansi – sebagaimana disebutkan oleh Amerika Serikat sebagai “*Unfaithful Ally*”. Sehingga, terbentuk sebuah ketegangan dalam hubungan Turki dengan negara-negara Barat. Meskipun demikian, kebijakan luar negeri Turki yang berlandaskan *hedging* tidak semestinya dipandang sebagai sebuah ancaman atau ketidaktaatan. Sebaliknya, pendekatan

tersebut dapat dilihat sebagai peluang strategis bagi NATO, mengingat posisi Turki sebagai *Emerging Middle Power* yang memiliki kemampuan untuk memproyeksikan pengaruhnya di kawasan regional – sebuah kawasan yang meliputi Rusia sebagai tetangganya. Posisi geografis Turki yang berada di perbatasan antara Eropa dan Asia, serta pengaruhnya di kawasan Laut Hitam dan Timur Tengah, menjadikannya negara yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas kawasan. Turki pula telah membuktikan komitmennya akan kedamaian Ukraina melalui pendekatan mediasi dengan Rusia. Langkah ini dinilai selaras dengan tujuan NATO, yakni mengurangi eskalasi konflik, menghalau ancaman Rusia, dan menjamin keamanan Ukraina.

Meskipun kebijakan *hedging* Turki kerap dipandang sebagai pemicu ketegangan dalam hubungannya dengan NATO, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan unik Turki tidak melemahkan respons aliansi terhadap Rusia. Melainkan, peran Turki yang fleksibel dan pragmatis dalam menjaga relasi dengan berbagai kekuatan menjadikannya sekutu yang berharga bagi NATO. Terlebih lagi, dengan meninjau kembali usaha Turki yang mendukung tujuan NATO dalam perang Rusia-Ukraina serta mempertimbangkan kepentingan domestiknya di dalam aliansi

ini, Turki dapat dipandang sebagai sekutu yang terpercaya. Walaupun, pendekatannya mungkin berbeda dari anggota NATO lainnya – sebuah perbedaan yang mencerminkan posisinya yang khas sebagai negara *Emerging Middle Power*.

Referensi

- Aydın-Düzgit, S., & Tocci, N. (2022). *Turkey and the West: Fault lines in a troubled alliance*. Palgrave Macmillan.
- Aydın-Düzgit, S., Balta, E., & O'Donohue, A. (2020). *Turkey, Russia, and the West: Reassessing persistent volatility, asymmetric interdependence, and the Syria conflict*. Istanbul Policy Center.
- Aydın, M., & Aydıntaşbaş, A. (2025). *Bridging the Bosphorus: How Europe and Turkey can turn tiffs into tactics in the Black Sea*. European Council on Foreign Relations.
- Armutlu, A. (2023). NATO's changing role and Türkiye: Security dynamics and evolution of relations. *Middle East Perspectives*, 2(1), 2–51.
- Bailes, A., & Cottey, A. (2006). *Regional security cooperation in the early 21st century*. Stockholm International Peace Research Institute.
- Balta, E., & Bal, H. B. (2025). **How do middle powers act? Turkey's foreign policy and Russia's invasion of Ukraine**. *International Politics*.
<https://doi.org/10.1057/s41311-025-00679-9>
- Cheng-Chwee, K. (2008). The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore's Response to a Rising China. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 30, 159 - 185.
- Dalay, G., & Isachenko, D. (2022). *Turkey's stakes in the Russia-NATO rivalry: The Ukraine crisis and beyond*. SWP Comment.
- Dal, E., & Dal, E. (2015). On Turkey 's Trail as a “ Rising Middle Power ” in the Network of Global Governance : Preferences , Capabilities , and Strategies.
- Goh, E. (2020). The Asia Pacific's "Age of Uncertainty": Great Power Competition, Globalisation and the Economic-Security Nexus. *RSiS Working Papers*, (330). <https://doi.org/10356/143744>
- Haddad, M. (2023, February 16). Where does your country stand on the Russia-Ukraine war? *Al Jazeera*.
<https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/mapping-where-every-country-stands-on-the-russia-ukraine-war>

- Hale, W. (2013). *Turkish foreign policy since 1774*. Routledge.
- International Energy Agency. (2022). *A 10-point plan to reduce the European Union's reliance on Russian natural gas*. <https://www.iea.org/reports/a-10-point-plan-to-reduce-the-european-unions-reliance-on-russian-natural-gas>
- Jordaan, E. (2003). The concept of a middle power in international relations: distinguishing between emerging and traditional middle powers. *Politikon*, 30(1), 165–181. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>
- Kaplan, L. (2004). *NATO divided, NATO united: The evolution of an alliance*. Praeger Publishers.
- Kawasaki, T. (2021). Hedging against China: formulating Canada's new strategy in the era of power politics. *Canadian Foreign Policy Journal*, 27(2), 175–193. <https://doi.org/10.1080/11926422.2021.1901755>
- Kimmage, M. (2024, July 15). From Cold War to Cold Wars. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. <https://www.csis.org/analysis/cold-war-cold-wars>
- Lamont, C. K. (2015). *Research methods in international relations* (2nd ed.). SAGE.
- Lim, D.J., & Cooper, Z. (2015). Reassessing Hedging: The Logic of Alignment in East Asia. *Security Studies*, 24, 696 - 727.
- Marston, H. S. (2024). Navigating great power competition: A neoclassical realist view of hedging. *International Relations of the Asia-Pacific*, 24(1), 29–63. <https://doi.org/10.1093/irap/lcad001>
- Mearsheimer, J. (2001). *The tragedy of great power politics*. W. W. Norton.
- Nainggolan, P. (2020). Erdogan and Turkey as the new power in the Middle East. *Info Singkat*, 12(16), 7–12.
- Omiunu, F., Okafor, C., & Ngoka, R. (2024). NATO's strategy and its involvement in the Russian–Ukraine crisis. *African Journal of Politics and Administrative Studies*, 17(2), 379–399.
- Özkan, G., & Sariaslan, F. (2021). Energy security, geopolitics, and Turkey's foreign policy in the Caspian Basin. In *Inter-state and intra-state conflicts in global politics*.
- Parmeter, I. (2023). Strategic ambiguity: Turkey, Russia and the war in Ukraine. *Australian and New*

- Zealand Journal of European Studies*, 15(2), 18–32.
- Sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine. (2022). *European Commission*. https://finance.ec.europa.eu/eu-and-world/sanctions-restrictive-measures/sanctions-adopted-following-russias-military-aggression-against-ukraine_en
- Shlykov, P. (2023). The state of strategic hedging: Turkey's foreign policy and relations with Russia. *Russia in Global Affairs*, 21(3), 135–158.
- Snyder, G. (2002). Mearsheimer's world—Offensive realism and the struggle for security: A review essay. *International Security*, 27(1), 149–173.
- Statement by NATO Heads of State and Government on Russia's attack on Ukraine. (2022, February 25). NATO. <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2022/02/25/statement-by-nato-heads-of-state-and-government-on-russias-attack-on-ukraine>
- Süsler, B. (2019). Turkey: An emerging middle power in a changing world? *LSE IDEAS*.
- Ukraine in maps: Tracking the war with Russia. (2025). BBC. <https://www.bbc.com/news/articles/c010k4389g2o>
- Walt, S. M. (1990). *The origins of alliances*. Cornell University Press.
- Waltz, K. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press.
- What is NATO? (2024). NATO. <https://www.nato.int/en/what-is-nato>